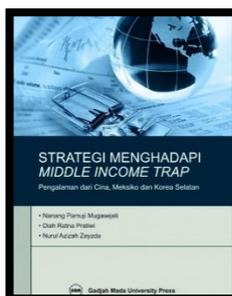


STRATEGI MENGHADAPI *MIDDLE INCOME TRAP*:

Pengalaman dari Cina, Meksiko dan Korea Selatan



Judul: Strategi Menghadapi Middle Income Trap: Pengalaman dari Cina, Meksiko dan Korea Selatan

Penulis: Nanang P. Mugasejati, Diah R. Pratiwi, Nurul A. Zayzda

Penerbit: UGM Press

Jumlah Halaman: ix + 147 halaman

Cetakan Pertama: April 2015

ISBN: 978-979-420-984-4

Middle Income Trap (MIT) adalah fenomena yang banyak mengancam negara-negara berkembang yang sedang berusaha membangun ekonominya. MIT dimaknai sebagai suatu situasi dimana negara-negara berpendapatan menengah (*middle-income countries*) sulit meningkatkan posisi mereka ke pendapatan tinggi. Dengan kata lain, negara-negara tersebut sudah berhasil lolos dari kategori miskin, tetapi stagnan di kategori berkembang, sehingga tidak berhasil mencapai negara maju. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang diramalkan atau bahkan ada yang menganggap sudah terjatuh ke jebakan tersebut. Hal ini lah yang mendorong tim penulis menulis buku ini, untuk menawarkan bagaimana strategi yang bisa digunakan Indonesia untuk bisa menghindari atau terlepas dari jebakan tersebut.

Argumen utama yang diusung buku ini adalah bahwa terjebaknya suatu negara ke dalam MIT adalah akibat dari kebijakan industri yang telah dijalankan semenjak negara tersebut berdiri. Khususnya terkait kebijakan inovasi yang memiliki pengaruh terhadap kemungkinan pembangunan industri yang mengangkat perekonomian sebuah negara. Namun, selain kebijakan industri, hal lain yang juga berpengaruh adalah sistem politik yang juga mempengaruhi pembangunan dan perekonomian suatu negara. Dalam proses merumuskan strategi, penulis terlebih dahulu menceritakan bagaimana pengalaman negara-negara yang pernah terjatuh ke jebakan tersebut, baik yang dianggap berhasil melepaskan diri, maupun yang sampai saat ini masih belum berhasil lepas dari jeratan tersebut. Dari sana kemudian diambil pembelajaran dan tim penulis merumuskan strategi untuk konteks Indonesia. Tiga Negara yang dijadikan *benchmark* adalah Meksiko, Korea Selatan dan Cina.

Negara pertama yang dijadikan sebagai *benchmark* adalah Meksiko sebagai negara yang pernah mengalami *economic boom* dengan proyeksi pertumbuhan yang meyakinkan namun akhirnya terjebak dalam MIT sampai sekarang. Dalam sejarah pembangunan ekonomi Meksiko, terdapat keterkaitan antara institusi dalam kerangka politik terhadap pertumbuhan ekonomi. Perjalanan politik dan ekonomi Meksiko terjadi cukup dinamis. Kebijakan ekonomi Meksiko terus berganti sejalan dengan pergantian rezim. Pada awal pembangunan di era kepemimpinan diktator Porfiriato Diaz, kebijakan yang diusung adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada konsep pertumbuhan. Model pembangunan Porfiriato menitikberatkan pada penanaman modal asing. Kebijakan tersebut berubah pada era kepemimpinan Partai Revolusi Institusional (PRI) yang menerapkan kebijakan substitusi impor untuk industri (*Import Substitution Industry/ISI*). Langkah-langkah yang dilakukan Meksiko untuk memaksimalkan kebijakan ISI adalah melakukan proteksi impor dengan membatasi impor barang; membatasi arus Penanaman Modal Asing (PMA) serta kebijakan industri difokuskan kepada sektor-sektor tertentu khususnya membangun industri manufaktur barang-barang modal. Kebijakan ISI telah mengantarkan Meksiko pada periode ekonomi keemasan. Namun model perekonomian tersebut lemah ketika berhadapan dengan krisis global.

Di era rezim setelah itu, Meksiko terus menerapkan ISI, namun membuat pengecualian dengan kebijakan *maquiladora*. *Maquiladora* adalah perusahaan yang dibangun untuk memproduksi barang berdasarkan bahan baku impor sementara dan peralatan untuk transformasi di Meksiko. Ciri khas *Maquiladora* adalah memanfaatkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah memberikan akses pada barang-barang modal bebas pajak. Kebijakan ISI yang dipadukan dengan *maquiladora* telah membawa Meksiko ke level ekonomi menengah. Stagnasi terjadi ketika angka pertumbuhan GDP berhenti di bawah 5 persen yang sudah dimulai semenjak awal tahun 1980-an. Meksiko mulai menggunakan kebijakan liberalisasi ekonomi ketika memasuki era 1980-an. Hal itu ditandai dengan bergabungnya Meksiko dengan GATT dan kemudian NAFTA di tahun 1994. Sekalipun semakin liberal dan volume perdagangan internasional meingkat drastis, namun Meksiko tidak berhasil mengangkat angka pertumbuhannya. Meksiko mengalami hambatan dalam pembangunan industri sehingga level industrinya tidak *ter-upgrade* sekalipun mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam periode 1930-1970.

Selanjutnya, penulis menceritakan tentang pengalaman Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu negara yang terbilang berhasil melepaskan diri dari MIT. Pada tahun 1960-an ekonomi Korea Selatan begitu buruk akibat perang saudara dengan Korea Utara (1950-1953). Dalam upaya pemulihan pasca perang, Korea Selatan sangat bergantung pada bantuan luar negeri. GDP per kapita hanya 79 USD pada 1960 tersebut, lalu pada 1961 sebesar 89 USD. Kondisi IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) juga sangat buruk saat itu, hanya terdapat dua lembaga milik pemerintah yang bertanggungjawab atas perkembangan IPTEK. Namun 35 tahun kemudian, yaitu pada 2005, GDP per kapita naik 150 kali lipat menjadi 11.432 USD. Pada tahun 2009 menjadi 20.800 USD per kapita. Korea Selatan saat ini dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi internasional. Sebuah pencapaian kemajuan yang luar biasa.

Berbagai studi menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi Korea Selatan merupakan hasil dari kuatnya intervensi pemerintah dalam proses integrasi ekonomi dengan pasar, yang dikenal dengan model pertumbuhan ekonomi "*development states*". Pendapat lain menyatakan bahwa Korea Selatan menerapkan strategi ganda, yaitu akumulasi kapital dikombinasikan dengan intervensi pemerintah. Ada beberapa hal yang menjadi kunci pembangunan ekonomi di Korea Selatan, yaitu: intervensi yang kuat dari pemerintah (*government-led economy*); *upgrading* teknologi melalui R&D (penelitian dan pengembangan); pembangunan SDM yang berjalan baik, dan pengintegrasian dengan ekonomi pasar. Selain faktor-faktor kunci tersebut, faktor yang sangat berperan dalam mendukung percepatan pengembangan inovasi industrial di Korea Selatan adalah keterlibatan Universitas Riset secara aktif dalam pembangunan perekonomian.

Kemudian penulis juga menyajikan bagaimana pengalaman Cina dalam menghindari MIT. Bagaimana Cina melompat menjauhi *middle incom trap*. Reformasi ekonomi dilakukan Cina dimulai sejak era Deng Xiaoping dengan melakukan penyesuaian ideologi sosialisme Cina dengan tuntutan pasar yang disebut Deng pada tahun 1984 sebagai "Sosialisme dengan Karakter Cina". Proses pembangunan ekonomi Cina tersebut sesuai dengan prinsip modernisasi. Keterbukaan ekonomi mendatangkan investasi yang besar dan ketersediaan kapital tersebut menjadi titik tolak Cina dalam pembangunan ekonomi. Namun hal tersebut tidak terlepas dari masalah umum di negara berkembang, yaitu ketimpangan/kesenjangan sosial yang terbuka lebar. Hal ini diikuti oleh tantangan pada level makro, yaitu Cina akan segera terjebak di dalam MIT. Dalam merespon ancaman tersebut Cina berinvestasi besar pada inovasi *indigeneous*. Hal ini sesuai dengan prinsip pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yaitu inovasi *indigeneous* (inovasi dari dalam) sebagai cara untuk meningkatkan faktor produktivitas. Untuk menstimulasi inovasi, Cina mendorong sektor penelitian dan pengembangan atau *research & development* (R&D). *Indigeneous innovation* di Cina tercapai karena 2 (dua) faktor, yaitu pelembagaan R&D dan integrasi R&D dengan pasar.

Berkaca dari pengalaman tiga negara tersebut, kemudian penulis merumuskan dan menawarkan strategi yang harus dilakukan Indonesia untuk dapat terhindar dari *middle income trap*, yaitu: *Pertama*, Indonesia perlu mengenali bentuk hubungan antara pembangunan industri dan situasi pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung di Indonesia. *Kedua*, bagaimana sistem politik Indonesia mempengaruhi bentuk-bentuk kebijakan pembangunannya. *Terakhir*, memberi fokus strategi keterbukaan yang dijalankan Indonesia dan pengaruhnya kepada pembangunan industri dan pertumbuhan. Dengan mempelajari hubungan tersebut dapat dirumuskan kemungkinan-kemungkinan kebijakan tepat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Di akhir bagian buku, penulis menyajikan diskusi mengenai pembangunan di Indonesia dari tiga aspek. Diawali dengan mendiskusikan apakah saat ini Indonesia sudah terjat MIT atau belum. Ada beberapa pendapat disajikan, ada yang menyatakan Indonesia belum masuk perangkap tersebut, karena baru saja melewati pendapatan rendah. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Indonesia akan segera terjebak dalam MIT dengan melihat beberapa indikator. Bagian ini juga menyajikan laporan dari Kelompok Kerja untuk Daya Saing Indonesia yang menggambarkan situasi pembangunan Indonesia ditinjau dari beberapa aspek. Di dalam laporan dipresentasikan *catch-up index*, yaitu perbandingan kuantitatif level pembangunan Indonesia dengan negara lain dalam 9 (Sembilan) indikator. Dari kesembilan indikator tersebut, Indonesia secara umum masih memiliki peringkat yang rendah. Indikator yang terkait langsung dengan pembangunan industri seperti kapasitas teknologi dan kapasitas inovasi masih menunjukkan pencapaian yang sangat lemah. Rendahnya peringkat kapasitas teknologi diakibatkan oleh pendaftaran paten, jumlah publikasi internasional, sementara inovasi diwakili oleh rendahnya pengeluaran R&D di universitas, lemahnya kolaborasi riset dan industri.

Di bagian akhir buku, penulis menyajikan tinjauan umum mengenai kebijakan ekonomi dan kebijakan industri di Indonesia. Meskipun besar kemungkinannya Indonesia akan mengalami stagnasi dikarenakan industri yang tidak berkembang, Indonesia masih mempunyai kesempatan melalui reformasi struktural. Permasalahan utama selama ini adalah prioritas pembangunan yang tidak jelas sehingga inovasi tidak mendapat ruang dalam kebijakan publik. Indonesia juga harus memperhatikan dinamika demokrasinya. Buku ini memperlihatkan bahwa kelemahan terbesar Indonesia adalah ongkos politik yang melemahkan peran lembaga dalam pembangunan dan mengakibatkan prioritas pembangunan tidak terjaga, yang menyebabkan Indonesia mungkin mengalami stagnasi di tahun-tahun mendatang. Sehingga yang harus dilakukan Indonesia agar tidak mengalami stagnasi dan terus tumbuh hingga menjadi maju adalah pembenahan demokrasi agar dapat memaksimalkan demokrasi substantif. Apabila sudah memiliki platform yang jelas dengan lembaga yang berfungsi maksimal, Indonesia dapat memaksimalkan sumber daya manusia untuk kebutuhan inovasi dan pembangunan industri. Untuk mencapai yang kedua, diperlukan pendidikan yang dapat mempersiapkan SDM.

Buku ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya alur buku bagus dengan memulai dengan menceritakan pengalaman di negara lain, menganalisis kondisi di Indonesia, lalu merumuskan strategi untuk menghindari MIT. Sementara kelemahan buku ini adalah beberapa bagian agak sulit dipahami, sehingga perlu dibaca berulang-ulang untuk dapat memahaminya, misalnya bagian yang menjelaskan perjalanan sistem politik dan sistem ekonomi di Meksiko.

Penulis: Masrully (Analisis Kebijakan Ahli Pertama, Puslatbang PKASN LAN)

